Optimalkan Tata Kelola Keuangan Daerah, Pemkab Pasuruan Serahkan LHP Atas Belanja Daerah Bidang Insfrastruktur Tahun 2024



Senin, 23 Desember 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun 2024 kepada BPK Jawa Timur. LHP ini khusus membahas belanja daerah bidang infrastruktur. Penyerahan dilakukan oleh Pj. Bupati dan pejabat terkait pada 23 Desember 2024.

Penyerahan LHP dilakukan bersamaan dengan beberapa pemerintah daerah lain di Jawa Timur. Ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan evaluasi pengelolaan keuangan. LHP juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Mereka berkomitmen untuk menghasilkan laporan yang relevan dan mudah dipahami. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun demikian, Pemkab Pasuruan membutuhkan saran dari BPK untuk memperbaiki sistem keuangan daerah. Tujuannya adalah membangun sistem keuangan yang efektif, ekonomis, dan akuntabel. Perbaikan ini diharapkan berdampak positif bagi masyarakat.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur memberikan catatan terkait beberapa temuan pemeriksaan. Salah satu catatan penting adalah belum selarasnya indikator makro RKPD Kabupaten dengan RKPD Provinsi Jawa Timur. Hal ini perlu segera diperbaiki.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.